



Judul : DPR pecah terkait interpelasi
Tanggal : Sabtu, 17 November 2012
Surat Kabar : Bisnis Indonesia
Halaman : 12

DPR Pecah Terkait Interpelasi

JAKARTA—Suara legislator Senayan terbelah dalam menyikapi usulan hak interpelasi terkait kasus Hambalang, sesuai dengan rekomendasi Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN).

Jika sebelumnya Fraksi Demokrat menolak usulan tersebut kini justru Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta kepada anggota DPR untuk menggunakan hak interpelasi.

"Kami sangat mendukung rekomendasi tersebut. Tetapi jangan sampai hak interpelasi digulirkan hanya untuk mendapatkan keuntungan politis dari Presiden, ini berarti hanya kepentingan sesaat semata," kata Ketua DPP Partai Hanura, Akbar Faisal, di Jakarta, Jumat (16/11).

Anggota Komisi II DPR ini berharap agar setiap anggota DPR menggunakan hak itu dengan benar, tak semata demi keuntungan jangka pendek, kepentingan partai atau elite partai. "Sekaranglah saatnya DPR kembali mendapatkan legitimasi. Tak lagi kongkalikong dengan Istana," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PPP, Lukman Hakim Syaefuddin, mengaku tidak ada alasan untuk tidak mendukung rekomen-

dasi BAKN DPR. "Itu usul yang bagus, dan kami akan membicarakannya dalam rapat pleno," tegas Lukman.

Pemerintah harus menjelaskan kepada publik atas semua hal yang terkait proyek Hambalang lewat Hak Bertanya DPR. Dengan begitu pemerintah bisa menunjukkan komitmennya dalam memberantas korupsi. "Tentu pleno FPPP akan segera memutuskannya. Saya mendukung rekomendasi ini," katanya.

FPD DPR menolak penggunaan hak interpelasi untuk kasus Hambalang. "Hambalang sudah diproses secara hukum yaitu melalui KPK, proses itu sedang berjalan, BPK sudah mengauditnya. Kami berikan kesempatan kepada KPK untuk menuntaskan kasus Hambalang. Jadi tidak ada urgensi interpelasi terhadap kasus yang sudah diproses," tegas Sekretaris FPD DPR Saan Mustopa, di Jakarta, Kamis (15/11).

BAKN DPR menemukan sejumlah penyelewengan dari hasil telaah audit BPK terhadap proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang. Atas temuan itu, BAKN merekomendasikan DPR menggunakan hak interpelasi. (Wahyu Kurniawan)